

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Turki melakukan Perundingan Kerja sama dengan Jepang dalam *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement*

Menurut Coplin, dalam membuat kebijakan politik luar negeri para pembuat kebijakan tidak dapat bertindak sembarangan karena sebuah tindakan politik dapat dianggap sebagai hasil dari pertimbangan terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi pembuat keputusan luar negeri. Aspek-aspek yang mempengaruhi para pembuat kebijakan tersebut berupa kondisi politik dalam negeri dari pembuat kebijakan, kondisi ekonomi maupun militer, dan konteks internasional. Aspek-aspek tersebut, yang telah dijelaskan oleh Coplin, merupakan hal yang sangat mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri dalam bertindak. (Coplin & Marbun, 2003) Aspek-aspek tersebut juga dapat digunakan untuk menjelaskan alasan yang mendorong pemerintah Turki melakukan perundingan kerja sama bilateral dengan Jepang dalam *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement* (EPA).

A. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dan militer juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri di satu negara. William D. Coplin menjelaskan dalam bukunya "*Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*", para pembuat kebijakan luar negeri harus memperhatikan kemampuan ekonomi maupun militer serta kelemahan-kelemahan yang ada di negaranya dalam proses pembuatan sebuah kebijakan luar negeri. kemampuan

ekonomi maupun militer dapat memberikan keuntungan kepada negara tersebut dalam berhubungan dengan negara lain, dengan memberikan dukungan maupun tuntutan kepada para pembuat kebijakan luar negeri. (Coplin & Marbun, 2003)

Kondisi perekonomian ekonomi Turki sejak di tahun 2002, mengalami peningkatan yang konsisten bila dibandingkan dengan era pemerintahan sebelum. Setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 2000 sampai 2001, pemerintahan yang baru, pemerintahan *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP), mulai melakukan reformasi struktural dan berusaha mewujudkan kestabilan di sektor makro ekonomi sehingga setelah tahun 2001 Turki mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Fenomena tersebut didukung oleh disiplin fiskal yang baik serta inflasi yang lambat. Selain itu, aliran investasi langsung dari luar negeri (*foreign direct Investment*, FDI) yang banyak. Privatisasi banyak dilakukan pada awal era AKP, terutama privatisasi badan usaha milik negara yang dengan skala besar dalam mendukung terwujudnya Neo-liberal di Turki. (Önis & Bayram, 2008) Gelombang reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Turki juga meliputi sektor perbankan, anggaran belanja dan pendapatan negara, dan undang-undang mengenai investasi asing. Turki mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, disiplin fiskal yang baik, mampu menarik FDI dalam jumlah yang banyak, dan sukses melakukan privatisasi. (Önis & Bayram, 2008)

Data dari *World Bank* menunjukkan bahwa perekonomian Turki secara konsisten mengalami pertumbuhan. Pada sektor *Gross Domestic Product* (GDP), Turki mengalami pertumbuhan GDP yang konsisten setelah tahun 2001. (World Bank, 2016) Sejak tahun 2002 investasi langsung asing atau *foreign direct Investment* (FDI) mulai banyak yang masuk ke Turki dan terus bertambah setiap

tahunnya sampai pada tahun 2007 dengan jumlah tertinggi pada dekade ini yaitu US\$22,047 miliar. Namun jumlah FDI sempat berkurang di tahun 2008 dan 2009 akibat krisis ekonomi, kemudian mulai bertambah lagi di tahun 2010- 2011. (World Bank, 2016) Dari segi perdagangan internasional (ekspor dan impor), Turki masih mengalami ketidakseimbangan perdagangan. Jumlah impor Turki masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ekspor. Namun, jumlah perdagangan internasional yang dilakukan oleh Turki terus meningkat sejak tahun 2002. (World Bank, 2016)

Dalam memulai EPA dengan Jepang, kondisi ekonomi Turki mempunyai pengaruh yang besar sebagai bahan pertimbangan dibandingkan dengan kondisi militer. Ini karena pemerintah Turki sejak AKP berkuasa, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi Turki melalui kebijakan liberalisasi ekonomi. Terlebih lagi, situasi politik Turki telah mengalami perubahan, yaitu tidak adanya intervensi dari pihak militer Turki yang di tandai dengan pengunduran para pejabat militer di antaranya, Kepala Staf Gabungan TSK, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan laut. Para petinggi militer yang mengundurkan diri tersebut kemudian digantikan oleh kandidat militer yang diusulkan oleh Erdoğan. (Fraser, 2011)

Bidang ekonomi, khususnya perdagangan, menjadi motivasi dan faktor pertimbangan kebijakan luar negeri Turki seperti kondisi pasar ekspor, peluang investasi, pariwisata, dan ketersediaan energi. (Öniş, 2011) Faktor ekonomi juga menjadi alat bagi pemerintah Turki untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga Turki yang kurang baik maupun mempererat hubungan baik dengan negara-negara lain. (Kirişci, 2009) Ini terlihat dari hubungan bilateral antara

Turki dengan negara-negara sekitarnya dalam perjanjian perdagangan bebas. Melalui perdagangan bebas dengan negara-negara tersebut, Turki memperoleh hasil berupa nilai ekspor sebesar 9,6% dan impor sebesar 4,5%. (Morrison, 2014)

1. Hubungan Perdagangan Turki dan Jepang

Menteri Negara yang bertanggung jawab dalam urusan perdagangan luar negeri, Kürşat Tüzmen, menghimbau pengusaha Jepang untuk berinvestasi di Turki dalam pertemuan dengan sekelompok pengusaha yang dipimpin oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Jepang, Nobuo Yamaguchi. Tüzmen menyinggung tentang rendahnya volume perdagangan antara Turki dan Jepang. Target dari Menteri tersebut adalah meningkatkan volume perdagangan Turki dan Jepang sehingga menjadi US\$ 12-13 miliar, dan menurutnya volume perdagangan kedua negara hanya menyumbang 1% dari target tersebut. (Turkish Daily News, 2007)

Turki paling sering mengekspor hasil agrikultur atau agrarisnya, karena Turki merupakan negara yang mampu memenuhi kebutuhan agrarisnya secara mandiri. Turki secara tradisional merupakan negara agraris, dengan sektor pertanian memberikan seperempat dari lapangan kerja dan hampir 10 persen dari GDP pada tahun 2012. Turki adalah produsen terbesar ketujuh global dari berbagai sereal, buah-buahan dan sayuran, biji minyak, dan teh. peternakan dan perikanan yang subsektor utama. (Morrison, 2014) Salah satu negara yang selalu menjadi tujuan ekspor hasil agrikultur Turki adalah Jepang. Pada hubungan perdagangan dengan Jepang, Turki lebih banyak mengekspor hasil agrikulturnya ke Jepang, karena Jepang merupakan negara yang banyak mengimpor hasil agrikultur. Laporan dari *Japan-Turkey Joint Study Group* juga menekankan kemungkinan bahwa sektor pertanian mampu menjadi dasar bagi hubungan kerja yang strategis,

mengingat isu sensitif untuk pasokan pangan khususnya untuk pihak Jepang. (Morrison, 2014)

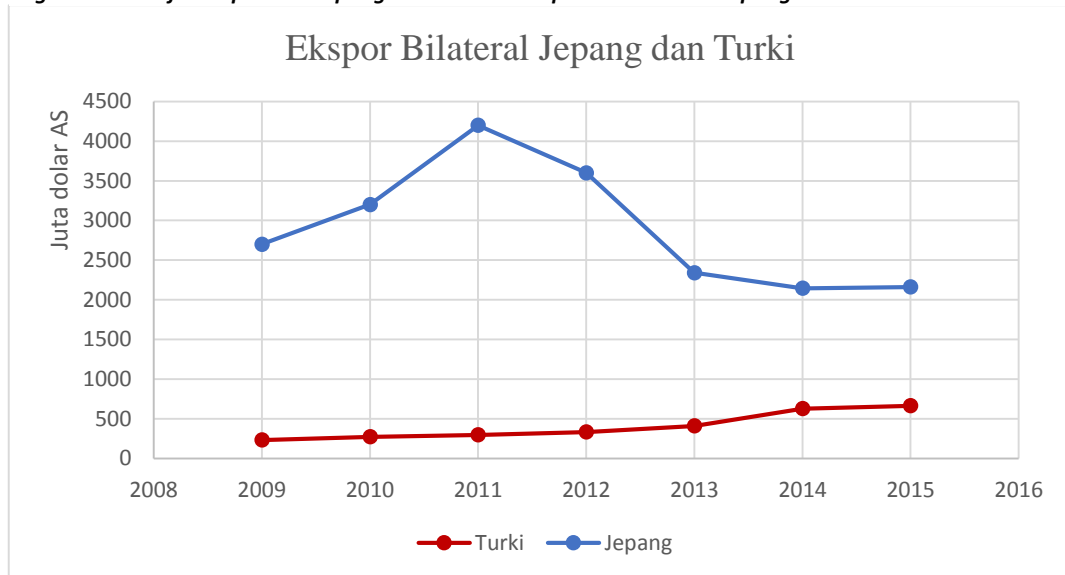
Neraca perdagangan antara Turki dan Jepang memang masih tidak seimbang, dengan nilai ekspor Jepang ke Turki jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ekspor Turki ke Jepang. Namun, ekspor dari Turki ke Jepang terus meningkat setiap tahunnya. Komoditas yang paling banyak di ekspor ke Jepang merupakan komoditas agrikultur yang selalu dibutuhkan oleh Jepang, sehingga Turki dapat memperoleh keuntungan secara terus-menerus karena Turki secara merupakan negara agraris, yang mampu memenuhi kebutuhan agrikulturnya secara mandiri. (Morrison, 2014)

Berdasarkan data dari *Japanese External Trade Organization* dan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Turki, di tahun 2009 ekspor dari Turki ke Jepang sebesar US\$ 232 Juta, sedangkan ekspor dari Jepang ke Turki sebesar US\$ 2,7 miliar. Pada tahun 2010, volume perdagangan kedua negara meningkat yaitu ekspor dari Turki ke Jepang sebesar US\$ 272,2 Juta, dan ekspor dari Jepang ke Turki sebesar US\$ 3,2 miliar. Peningkatan volume perdagangan terjadi lagi di tahun 2011, dengan ekspor Turki ke Jepang sebesar US\$ 296,4 juta dan ekspor dari Jepang ke Turki sebesar US\$ 4,2 miliar. Di tahun 2012, ekspor dari Turki ke Jepang meningkat yaitu sebesar US\$ 322,2 juta, sedangkan ekspor dari Jepang ke Turki malah berkurang menjadi US\$ 3,6 miliar. Di tahun 2013 ekspor Turki ke Jepang sebesar US\$ 409,3 juta, sedangkan ekspor dari Jepang ke Turki sebesar US\$ 2,34 miliar. Di tahun 2014, ekspor Turki ke Jepang menjadi sebesar US\$ 628 juta, sedangkan ekspor dari Jepang ke Turki sebesar US\$ 2,1 miliar. Dan pada tahun 2015, ekspor Turki ke Jepang mencapai US\$ 664,9 juta, sedangkan ekspor dari

Jepang ke Turki sebesar US\$ 2,1 miliar. (Ministry of Foreign affair of Turkey, 2015)

Menurut data dari *World Integrated Trade Solution*, komoditas-komoditas yang paling sering diperdagangkan oleh Turki dan Jepang adalah sektor barang modal (*capital goods*), barang siap konsumsi, produk makanan, mesin-mesin dan barang elektronik, tekstil, sayuran, alat transportasi, plastik dan karet, bahan kimia, bahan mentah, dan barang setengah jadi. Ekspor Turki ke Jepang sebagian besar

Bagan 1. 1 : Grafik ekspor dari Jepang ke Turki dan ekspor dari Turki ke Jepang dari tahun 2009-2015



Sumber : Republic of Turkey, Ministry of Foreign affair, http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-japan.en.mfa

Japanese External Trade Organization, Reports and Statistics, <https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/> berupa komoditas sayuran, produk makanan, barang-barang siap konsumsi, bahan mentah, dan tekstil. Sedangkan impor Turki dari Jepang paling sebagian besarnya berupa barang modal (*capital goods*), mesin-mesin dan barang elektronik, plastik dan karet, serta alat transportasi, bahan kimia, barang setengah produksi, dan beberapa barang siap konsumsi. (World Integrated Trade Solution, 2016)

2. Investasi Turki dan Jepang

Turki berhasil menarik perhatian investor Eropa dan negara-negara Teluk, negara-negara di Asia Timur dan negara-negara Asia Tenggara dengan struktur ekonomi yang kuat dan potensi serta penduduk muda dan dinamis dan letak geografi yang strategis. Beberapa negara ini termasuk Jepang, Singapura, Korea Selatan, Kuwait dan Rusia. Jepang melakukan investasi asing langsung (FDI) dengan rata-rata tahunan lebih dari US\$ 100 miliar. Investor Jepang sebagian besar tertarik pada otomotif, otomotif pasokan, bahan kimia, petro-kimia, makanan dan minuman dan produk tembakau sektor. Namun, saham FDI Jepang di Turki di bawah ekspektasi. *Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT)* berupaya untuk memperbesar saham FDI yang berasal dari Jepang, serta mengusahakan untuk menarik investasi yang akan memungkinkan terjadinya transfer teknologi ke Turki. (Kanan, 2015)

Pada bulan November 2008 ketika Presiden Gül mengunjungi Tokyo, ungkapan pertamanya ke media massa Jepang adalah bahwa ia datang bukan untuk perjalanan liburan, melainkan untuk memastikan bahwa hubungan Turki dengan Jepang, yang sangat baik dalam persahabatan dan politik, juga mencapai tingkat yang sama dalam hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Selama kunjungannya, Presiden Gül bertemu langsung dengan para pemimpin perusahaan Jepang, terutama yang dari sektor otomotif, dan memberitahu mereka tentang insentif yang ditawarkan pemerintah Turki. (Esenbel & Atli, 2013)

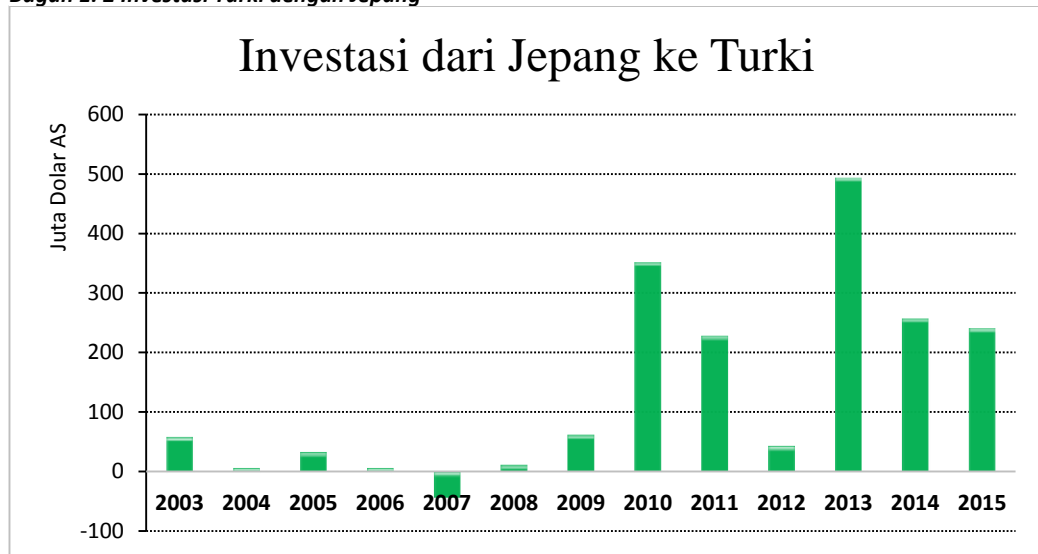
Pada tahun 2010, Jepang berkontribusi dalam melakukan investasi langsung di Turki dengan jumlah investasi sebesar US\$ 352 Juta atau 5,3% dari jumlah seluruh investasi asing langsung di Turki. Perusahaan Jepang yang sukses

bergerak di Turki meliputi sektor konstruksi, mobil, mesin, dan barang-barang elektronik, dan pada saat itu ada sekitar 162 perusahaan Jepang yang melakukan bisnis di Turki dengan modal dari Jepang. (Morrison, 2014)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh *Oxford business group* dengan menteri Zafer Çağlayan Di tahun 2012, menteri ekonomi Turki yang menjabat saat itu, Zafer Çağlayan, membuat program investasi 2012 dengan maksud, untuk mendukung strategi pembangunan nasional Turki, yang memprediksi bahwa Turki akan menjadi salah satu dari 10 negara dengan ekonomi terbesar di tahun 2023. Tujuan tersebut menurut Çağlayan, akan dapat terwujud dengan bantuan finansial dan bantuan teknis dari investor dan perusahaan asing. (Oxford Business Group, 2013)

Menurut data dari *OECD.stat*, investasi dari Jepang ke Turki pada tahun 2003 sebesar US\$ 58 Juta, pada tahun 2004 menurut cukup banyak menjadi sekitar US\$ 6 Juta. Pada tahun 2005 meningkat menjadi US\$ 33 juta, dan pada tahun 2006 turun lagi menjadi US\$ 6 juta. Pada tahun 2007 sebesar US\$ 4 juta, dan pada tahun 2008 sebesar US\$ 11 juta. Pada tahun 2009 investasi Jepang ke Turki sebesar US\$ 62 juta. Pada tahun 2010, investasi Jepang ke Turki meningkat signifikan yaitu US\$352 juta. Namun angka tersebut berkurang di tahun 2011 dan 2012, yaitu menjadi US\$ 228 juta di tahun 2011 dan US\$ 43 juta di tahun 2012. Pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi US\$ 494 juta, dan pada tahun 2014 dan 2015, angka tersebut terus meningkat menjadi US\$ 519 juta dan US\$ 524 juta. (OECD.stat, 2016)

Bagan 1. 2 Investasi Turki dengan Jepang



Sumber : FDI flows by partner country, OECD.Stat, 7 desember 2016 dari https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FDI_FLOW_PARTNER

B. Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, kebijakan luar negeri mendapat pengaruh dari kondisi politik dalam negeri, karena adanya interaksi antara pembuat kebijakan luar negeri dengan aktor atau entitas di dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri ini disebut “policy influencer”. Teori William D Coplin tersebut diperkuat oleh pendapat David Easton tentang sistem politik. Menurut Easton, Kondisi Politik Dalam Negeri merupakan gambaran mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negaranya atau oleh Easton disebut dengan *input*. Terdapat empat aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri yaitu Birokrat (*bureaucratic influencer*), Partai (*Partisan influencer*), Kelompok Kepentingan (*Interest influencer*), dan Massa atau pendapat masyarakat (*Mass influencer*). (Coplin & Marbun, 2003) Coplin menggunakan istilah *bureaucratic influencer*

sebagai rujukan terhadap individu-individu dan organisasi-organisasi dalam lembaga eksekutif pemerintah yang berperan dalam membantu para pembuat kebijakan dalam menyusun maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan. Terkadang anggota birokrasi juga memainkan peran sebagai pembuat kebijakan sehingga sulit untuk membuat pembeda antara birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* dengan birokrasi sebagai pembuat keputusan. Hal tersebutlah yang membuat birokrasi menjadi kelompok yang begitu berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. (Coplin & Marbun, 2003)

1. Aktor yang mempengaruhi dalam kebijakan Turkey-Japan Economic Partnership Agreement

Dalam memulai hubungan kerja sama dengan Jepang dalam *Turkey-Japan Economic Partnership Agreement* (EPA), *bureaucratic influencer* yang memiliki peran utama dibandingkan dengan *policy influencer* yang lain. *Bureaucratic influencer* tersebut adalah dari Menteri Ekonomi Turki yang menjabat yaitu Zafer Çağlayan.

Zafer Çağlayan adalah seorang politisi dan kader dari partai yang berkuasa yaitu *Adalet ve Kalkınma Partisi*. Zafer Çağlayan memiliki gelar teknik mesin dari Universitas Gazi di Ankara pada tahun 1980 dan memulai karirnya di industri aluminium. Zafer Çağlayan pernah menjabat sebagai presiden dari Ankara *Chamber of Industry* dan pernah juga sebagai wakil presiden dalam *Union of Chamber of Commodity Exchange of Turkey*. Zafer Çağlayan juga pernah menjabat sebagai pimpinan dari dua perusahaan aluminium dengan nama Akel Alüminyum A.Ş dan Çağlayanlar Alüminyum Limited. Pada pemilu tanggal 22 Juli 2007 Zafer Çağlayan terpilih sebagai wakil dari Ankara, kemudian Zafer Çağlayan diangkat

menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Turki untuk periode 29 Agustus 2007 sampai 1 Mei 2009. Kemudian pada tahun 2009, Zafer Çağlayan diangkat sebagai Menteri Negara yang bertanggung jawab pada perdagangan luar negeri untuk periode 2009 sampai 2011. Selanjutnya, pada pemilu tahun 2011, Zafer Çağlayan terpilih sebagai wakil AKP dari Mersin dan kemudian diangkat menjadi menteri pertama dalam kementerian yang baru dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2011, yaitu Kementerian Ekonomi. (Hürriyet Haber, 2013)

Kementerian Ekonomi (dalam bahasa Turki disebut Ekonomi Bakanlığı) adalah departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk urusan ekonomi Republik Turki. Didirikan setelah pemilihan umum tahun 2011 dengan Anggota Parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Zafer Çağlayan ditunjuk sebagai Menteri pertama Perekonomian. Pada awal berdirinya Republik Turki, Kementerian Ekonomi telah dibentuk, namun pada tahun 1934 Kementerian Ekonomi diubah menjadi Kementerian Ekonomi (Kepala urusan Perdagangan Luar Negeri), kemudian nama kementerian tersebut diganti menjadi Kementerian Perdagangan (Kepala urusan Perdagangan Luar Negeri) di tahun 1939. Perubahan-perubahan seperti itu, terus terjadi sampai tahun 2011. Pada tahun 1971, nama kementerian tersebut diubah menjadi Kementerian Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan pada bulan Desember 1971, diubah lagi menjadi Kementerian Perdagangan (Sekretariat Jenderal untuk Perdagangan Luar Negeri). Kemudian pada tahun 1983, kementerian ini diubah menjadi Wakil Menteri dengan nama Wakil menteri untuk kekayaan negara dan perdagangan luar negeri (*Undersecretariat for Treasury and Foreign Trade*) dan juga di tahun 1994 dengan nama Wakil Menteri untuk Perdagangan Luar Negeri (*Undersecretariat for Foreign Trade*). Kemudian di tahun 2011,

Kementrian Ekonomi dibentuk lagi oleh pemerintah Turki. (Republik of Turkey Ministry of Economy, 2014)

Menurut artikel yang dimuat dalam situs resmi Kementrian Ekonomi Republik Turki, tugas-tugas utama Kementrian Ekonomi Turki adalah menentukan kebijakan utama dan target mengenai perdagangan luar negeri untuk barang dan jasa; mengambil tindakan pencegahan untuk membentuk kegiatan ekonomi yang selaras dengan kebijakan yang berorientasi pada ekspor; Mengambil semua jenis tindakan yang menyangkut perdagangan luar negeri untuk barang dan jasa dengan maksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung perekonomian nasional; Mengambil tindakan pencegahan dalam upaya diversifikasi produk dan struktur pasar dengan tujuan meningkatkan pangsa Turki dalam perdagangan dunia dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di ekspor; Mengambil semua jenis tindakan yang diperlukan dalam kegiatan impor untuk mendukung perekonomian nasional dalam batas-batas kewajiban internasional; Melakukan hubungan ekonomi bilateral, regional dan multilateral antara Turki dengan negara-negara lain maupun organisasi internasional; Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menarik investasi asing langsung ke Turki; Mengambil tindakan pencegahan dalam rangka memberikan peraturan yang efektif pada insentif investasi untuk mendukung perekonomian nasional; Menjamin keamanan dan kesesuaiannya dari produk yang ditujukan untuk perdagangan luar negeri dengan peraturan dan standar serta mengadakan inspeksi impor dan ekspor untuk tujuan ini. Sehubungan dengan keamanan produk, regulasi teknis dan inspeksi, mengkoordinasikan ketentuan undang-undang dan pelaksanaannya. Menyelenggarakan hubungan Turki dengan Uni Eropa dan menyelaraskan

peraturan-peraturan yang dimiliki Turki dengan Uni Eropa, pada isu-isu perdagangan. (Republik of Turkey Ministry of Economy, 2014)

2. Pengambilan Kebijakan untuk Turkey-Japan Economic Partnership Agreement

Pada Januari 2012 Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gamba berkunjung ke Turki untuk bertemu dengan Menteri ekonomi Turki Zafer Çağlayan, Menteri Luar negeri Turki Ahmet Davutoğlu, serta untuk berbincang dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan. Dalam kunjungan tersebut Menteri Gamba dan Menteri Çağlayan sepakat untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi kedua negara, dan Menteri Çağlayan menyatakan keinginannya untuk segera menanda tangani Memorandum untuk membangun kerangka kerja sama dalam hubungan ekonomi yang sedang dirancang oleh kedua negara. Menteri Çağlayan juga menyampaikan keinginannya untuk segera mengadakan perjanjian perdagangan bebas antara Turki dengan Jepang. Kemudian Menteri Gamba menyatakan keinginannya untuk menandatangani Memorandum tersebut pada waktu yang tepat, sekaligus membahas perjanjian perdagangan bebas dalam konteks itu. Selanjutnya Menteri Çağlayan mengatakan niatnya untuk berkunjung ke Jepang dalam waktu dekat. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2012)

Dalam perbincangannya dengan Perdana Menteri Turki, Erdoğan menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan kerja sama bilateral yang lebih kuat di masa mendatang. Selain itu, Perdana Menteri Erdoğan menyatakan terima kasih untuk kemajuan nyata yang telah dilakukan Jepang dalam kerja sama Turki dan Jepang pada pembangunan Jembatan Bosphorus Ketiga, Terowongan Lintas Bosphorus, dan di sektor ruang angkasa. Menanggapi Menteri Erdoğan, Menteri

Gemba menyatakan akan memperkuat hubungan Turki dengan Jepang. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2012)

Wacana untuk meningkatkan hubungan kerja sama Turki dan Jepang kemudian direalisasikan pada bulan Juli 2012, saat Menteri Çağlayan berkunjung ke Jepang dan menandatangani Memorandum yang telah dibahas sebelumnya yaitu “*Memorandum on Establishing a Framework for Cooperation in Economic Relations between the Government of Japan and the Government of the Republic of Turkey*”. Setelah menandatangani Memorandum tersebut, Menteri Çağlayan dan Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba serta Menteri Ekonomi Jepang Yukio Edano membentuk sebuah kelompok studi bersama yang dinamakan “*Japan-Turkey EPA joint study group*” yang bertugas untuk membahas peluang-peluang yang didapat dalam pelaksanaan kerja sama ekonomi kedua negara dalam EPA. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2012)

Menteri Çağlayan berkunjung ke Jepang pada Juli 2012 untuk bertemu dengan Menteri Ekonomi Jepang Yukio Edano dan Menteri Luar negeri Jepang Koichiro Gemba. Dari pertemuan tersebut, kedua pihak menandatangani “*Memorandum on Establishing a Framework for Cooperation in Economic Relations between the Government of Japan and the Government of the Republic of Turkey*”, memorandum tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hubungan Turki dan Jepang terutama dalam bidang Ekonomi. Ketiga menteri tersebut kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok studi bersama (*joint study group*) untuk mempelajari prospek dari dimulainya negosiasi mengenai EPA antara Turki dan Jepang. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2012)

Kelompok studi bersama (*Japan-Turkey EPA joint study group*) kemudian dibentuk pada Oktober 2012 dan beranggotakan perwakilan dari para pelaku industri dan para akademisi dari Turki dan Jepang. *Japan-Turkey EPA joint study group* melakukan pertemuan sebanyak dua kali yaitu di Tokyo dan di Ankara masing-masing pada Oktober 2012 dan Februari 2013. Dari pertemuan tersebut, *Japan-Turkey EPA joint study group* setuju bahwa kerja sama Turki dan Jepang dalam EPA dapat membawa keuntungan berupa peningkatan perdagangan dan investasi kedua negara, lebih menghidupkan aktivitas bisnis bagi perusahaan-perusahaan di Turki dan Jepang, serta mempererat hubungan diplomasi antara Turki dan Jepang. Kelompok studi bersama ini kemudian merekomendasikan kepada kedua negara untuk segera melakukan kerja sama dalam EPA. (Joint Study Group, 2013)

Pertimbangan dari rekomendasi *Joint Study Group* tersebut adalah perdagangan luar negeri merupakan salah satu kekuatan pendorong ekonomi Turki. Melalui FTA yang telah terjalin sebelumnya, Turki telah memperoleh kenaikan sebesar 9,6% dari ekspor dan 4,5% dari impor Turki. (Joint Study Group, 2013)

Selain itu, Turki adalah sebuah negara, dengan pasar domestik yang terdiri dari 75.600.000 orang, yang menikmati salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di antara negara-negara OECD. Selain itu, Turki memiliki struktur demografi terdiri dari sebagian besar penduduk muda dengan usia rata-rata di bawah 30 tahun, yang menciptakan pasar tenaga kerja dan upah yang relatif murah. Selanjutnya, karena dekat dengan Eropa, Timur Tengah dan wilayah Afrika, Turki tidak hanya menonjol dengan pasar domestik, tetapi juga sebagai basis produksi untuk negara-negara sekitarnya. Jepang mengekspor produk industri seperti mobil, kapal dan

mesin konstruksi, sedangkan Turki mengekspor tembakau, produk perikanan, sayuran, buah-buahan, makanan olahan, produk tekstil seperti pakaian, karpet dan suku cadang mobil yang mencerminkan bahwa perdagangan bilateral yang saling melengkapi. Namun, masih sulit untuk mengatakan bahwa kedua negara telah mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki dengan sepenuhnya. (Joint Study Group, 2013)

Sebagai importir terbesar dunia dari produk pertanian dan perikanan, Jepang secara berkontribusi terhadap perluasan perdagangan internasional barang pertanian dan perikanan. Dalam keadaan di mana lahan pertanian dan jumlah petani dan nelayan terus menurun dengan meningkatnya penuaan tenaga kerja yang disebabkan oleh kurangnya penerus, pemerintah Jepang berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan makanan rasio swasembada sampai 50% secara kalori pada tahun 2020, dengan tujuan menjaga pasokan makanan yang stabil dan beberapa fungsi pertanian. Untuk alasan ini, pertimbangan atas sensitivitas di bidang barang-barang pertanian dan perikanan sangat penting dalam EPA dengan menghilangkan hambatan perdagangan pada sektor ini. (Joint Study Group, 2013)

Joint Study Group juga merekomendasikan agar membuat aturan-aturan yang mampu mencegah barang dari negara-negara ketiga dari menghindari aturan, tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu, menerapkan aturan memihak, netral dan konsisten, memastikan transparansi, kejelasan dan prediktabilitas, membuat aturan yang mudah dipahami bagi pengguna dan sederhana untuk menerapkan bagi pemerintah. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan aspek menciptakan lapangan kerja, memajukan transfer teknologi dan memperbaiki defisit neraca berjalan, Turki mengharapkan

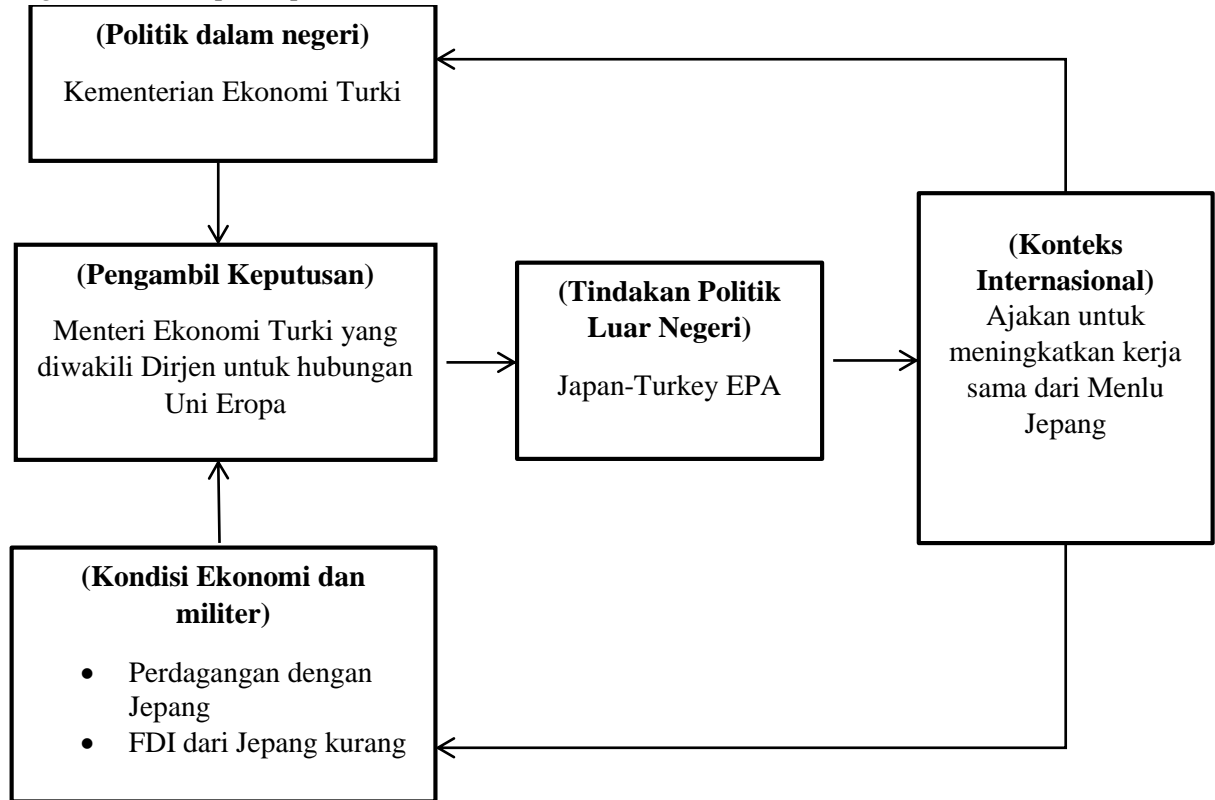
peningkatan lebih lanjut dari investasi Jepang melalui EPA. Sementara itu, perusahaan Jepang sudah berencana untuk melakukan bisnis di sana, dan mengharapkan perbaikan lingkungan investasi dan bisnis di Turki, mengingat negara ini memiliki potensi keuntungan bukan hanya karena pasar domestik, tetapi juga karena perannya sebagai basis produksi untuk pasar yang lebih luas termasuk ke negara-negara tetangga. Selain itu, pembentukan lingkungan kompetitif yang cermat dapat memberikan keuntungan sebagai hasil dari liberalisasi perdagangan dan investasi. Sehingga perlu mengatur prinsip-prinsip dasar dari kebijakan persaingan termasuk non-diskriminasi, keadilan prosedural dan transparansi serta promosi kerjasama antara otoritas persaingan kedua negara. (Joint Study Group, 2013)

Untuk dapat memahami pertimbangan dari *Joint Study Group for Japan-Turkey EPA*, dapat membaca laporan dari *Joint Study Group* yang telah terlampir.

Perundingan untuk *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement* (EPA) diadakan pada tanggal 1 dan 2 Desember 2014 di Tokyo. Pertemuan ini dihadiri oleh, Toshiro Suzuki, Duta Besar yang bertanggung jawab mengenai Perdagangan Internasional dan Urusan Ekonomi di pihak Jepang, dan perwakilan dari departemen terkait lainnya. Di sisi Turki diwakili oleh Direktorat Jenderal dari Kementrian Ekonomi, Murat Yapici selaku Direktur Jenderal untuk Hubungan Uni Eropa dan perwakilan dari departemen terkait lainnya. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014) Secara sederhana, penerapan teori pembuatan kebijakan luar negeri milik Coplin dalam penelitian terhadap motivasi Turki dalam meningkatkan kerja

sama ekonomi dengan Jepang dalam *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement* dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Bagan 1. 3 Skema penerapan teori



Sumber : Coplin, W. D., & Marbun, M. (2003). *Pengantar Politik internasional : Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.